



JURNAL ILMU MANAJEMEN

Published every June and December
e-ISSN: 2623-2081, p-ISSN: 2089-8177

Journal homepage: http://jurnal.um-palembang.ac.id/ilmu_manajemen



Manajemen Risiko: Deteksi Dini Upaya Pencegahan *Fraud*

eko Sudarmanto

e-mail: ekosudarmanto.umt@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Muhammadiyah Tangerang

[UMT] Indonesia

ARTICLE INFO

<https://doi.org/10.32502/jimn.v9i2.2506>

Article History

Received:

13 Mei 2020

Accepted:

30 Mei 2020

Available online:

15 Juni 2020

Keywords:

Manajemen Risiko, Fraud

ABSTRACT

The economic costs of fraud in financial statements continue to be a problem for organizations and the public. The problem discussed in this study is limited risk management strategies to detect early for the prevention of fraud made by company managers and auditors. This strategy is important for proactive fraud prevention and for the integrity of financial statements in the future. The aim of this multi-case qualitative study is to explore early detection and methods of preventing fraud on financial statements using a conceptual framework of risk management. As a conclusion, there is a gap in the concept of risk management in current practice to detect and prevent fraud, and how the auditor's perspective in creating a proactive anti-fraud model. In addition, with this finding practitioners can develop proactive anti-fraud risk management procedures, and for auditors can develop early detection guidelines in fraud prevention.

ABSTRAK

Biaya ekonomi atas praktik kecurangan (fraud) dalam laporan keuangan terus menjadi masalah bagi organisasi dan masyarakat. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah terbatas strategi manajemen risiko untuk mendeteksi dini guna pencegahan fraud yang dibuat oleh manajer perusahaan dan auditor. Strategi ini penting untuk pencegahan fraud yang proaktif dan untuk integritas laporan keuangan di masa yang akan datang. Tujuan dari penelitian kualitatif multi-kasus ini adalah untuk mengeksplorasi deteksi dini dan metode pencegahan terhadap fraud atas laporan keuangan dengan menggunakan kerangka kerja konseptual manajemen risiko. Sebagai simpulan yaitu adanya celah konsep manajemen risiko dalam praktik saat ini untuk mendeteksi dan mencegah fraud, serta bagaimana perspektif auditor dalam membuat model anti-fraud yang proaktif. Selain itu, dengan temuan ini para praktisi dapat mengembangkan prosedur manajemen risiko anti-fraud yang proaktif, dan bagi auditor dapat mengembangkan pedoman deteksi dini dalam pencegahan fraud.

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Pendahuluan

Kecurangan atau yang lebih dikenal dengan istilah *fraud*, masih menjadi isu yang fenomenal dan sangat menarik untuk dibahas dan dilakukan kajian atas berbagai kasus yang saat ini masih sering terjadi di masyarakat. *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* mendefinisikan *fraud* (kecurangan) yaitu penggunaan suatu jabatan oleh seseorang untuk memperkaya dirinya melalui penyalahgunaan yang disengaja atau penyalahgunaan penggunaan aset atau sumber daya organisasi. Atau dengan kata lain, *fraud* adalah kecurangan berkenaan dengan adanya keuntungan yang diperoleh seseorang dengan menghadirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Di dalamnya termasuk unsur-unsur *surprise* / tak terduga, tipu daya, licik, dan tidak jujur yang merugikan pihak lain (ACFE, 2008). Sehingga *fraud* dapat diartikan sebagai tindakan penipuan atau kekeliruan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan kerugian kepada individu atau entitas pihak lain (Surjandari, 2015). *Fraud* menciptakan kesalahan penilaian atau mempertahankan penilaian salah yang ada untuk membujuk seseorang membuat suatu kontrak. Hal tersebut dilakukan karena menyangkut memperkaya diri sendiri secara sengaja dengan cara menmgurangi *value*/nilai aset secara rahasia (Enofe, 2013).

Fraud meliputi ketidakjujuran yang disengaja, kesalahan penyajian, manipulasi dan menampilkan fakta yang dapat merugikan orang lain dan organisasi termasuk bank. *Fraud* juga meliputi pencurian, *apropriasi*, upaya untuk memperoleh sesuatu secara ilegal, dan kesalahan dalam membuat laporan keuangan termasuk aset dan kewajiban organisasi (Gilbert & Wakefield, 2018). Sehingga *fraud* adalah penipuan yang menyertakan elemen-elemen: (a) sebuah representasi; (b) mengenai sesuatu yang bersifat material; (c) sesuatu yang tidak benar;

(d) dan secara sengaja atau secara serampangan dilakukan untuk kemudian; (e) dipercaya; (f) dan ditindaklanjuti oleh korban; (g) sehingga pada akhirnya korban menanggung kerugian (Zimbelmann, *et. al*, 2014).

Secara skematis, ACFE menggambarkan *fraud* dalam hubungan kerja (*occupational fraud*) dalam bentuk *fraud tree*. Pohon kecurangan ini menggambarkan cabang-cabang dari kecurangan dalam hubungan kerja, beserta ranting dan anak rantingnya. Sehingga *occupational fraud tree* mempunyai tiga cabang utama, yaitu *corruption* (korupsi), *asset misappropriation* (penyalahgunaan aset), dan *fraudulent statements* (kecurangan laporan keuangan) (Tuanakotta, 2010).

Salah satu penjelasan teoritis mengenai penyebab seseorang melakukan *fraud*, pertama kali dikembangkan oleh Donald Cressey dengan teorinya yang dikenal dengan *fraud triangle*. Dalam teorinya dijelaskan bahwa *fraud triangle* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization* (Cressey, 1950). *Pressure* adalah penggelapan uang perusahaan oleh pelaku yang bermula dari suatu tekanan. Orang tersebut mempunyai kebutuhan keuangan yang mendesak, sehingga secara personal kebutuhan individu dianggap lebih penting dari kebutuhan organisasi. Penyebab *fraud* kedua yaitu *opportunity*, dimana kecurangan akan dilakukan jika ada kesempatan dimana seseorang harus memiliki akses terhadap aset atau memiliki wewenang untuk mengatur prosedur pengendalian yang memperkenankan dilakukannya skema kecurangan. Penyebab yang ketiga yaitu *rationalization*, artinya kecurangan yang dilakukan karena ada rasionalisasi yang dilakukan seseorang atau kelompok orang dengan membangun pembenaran atas kecurangan yang dilakukan. Pelaku *fraud* biasanya mencari alasan pembenaran bahwa yang dilakukannya bukan pencurian atau kecurangan, tetapi sesuatu yang memang

merupakan haknya. Namun demikian, beberapa individu lebih rentan melakukan kecurangan dibandingkan individu yang lain. Kecenderungan untuk melakukan kecurangan tergantung pada nilai-nilai etika dan keadaan pribadi mereka (Abdullahi, *et. al*, 2015).

Menurut laporan *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* tahun 2020, berdasarkan frekuensi tindakan kecurangan yang terjadi, penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) merupakan tindakan kecurangan yang memiliki frekuensi tertinggi disusul oleh korupsi (*corruption*) dan yang terakhir adalah kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*). Tetapi *financial statement fraud* adalah jenis kecurangan yang memiliki dampak kecurangan yang paling merugikan diantara jenis kecurangan lainnya (ACFE, 2020).

Kecurangan laporan keuangan dianggap sebagai kecurangan manajemen yang mengakibatkan kekeliruan bersifat material pada laporan keuangan sehingga laporan keuangan mengandung informasi yang menyesatkan. Meningkatnya berbagai kasus skandal akuntansi di berbagai negara belahan dunia menyebabkan berbagai pihak berspekulasi bahwa manajemen telah melakukan kecurangan pada laporan keuangan (Skousen & Wright, 2009).

Kecurangan laporan keuangan selalu berhubungan dengan tata kelola perusahaan. Menurut Dechow, *et.al.* (2012), insiden kecurangan tertinggi pada perusahaan dengan sistem tata kelola perusahaan yang lemah. Kecenderungan melakukan tindakan kecurangan lebih besar terjadi pada perusahaan dengan latar belakang yang didominasi oleh pihak dalam (*insider*) dan berkemungkinan besar tidak memiliki komite audit (Dechow, *et.al.*, 2012).

Upaya pencegahan terhadap tindakan *fraud* akan lebih efektif untuk dilakukan dibandingkan dengan melakukan upaya represif. Pencegahan perlu dilakukan untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan rusaknya reputasi institusi maupun individu. Selain itu, kejadian kecurangan yang tidak segera ditangani dan terungkap karena

lambatnya penanganan akan semakin memberi peluang pelaku untuk menutupi tindakannya dengan kecurangan yang lain. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya kecurangan yang benar dan tepat sasaran, sehingga segala bentuk dan upaya praktik kecurangan dapat diantisipasi sedini mungkin agar terhindar dari risiko kerugian (Kurniasari, 2017).

Banyak upaya untuk mencegah praktik kecurangan yang telah dilakukan berdasarkan teori maupun penelitian yang ada, dengan harapan praktik kecurangan dapat diantisipasi sedini mungkin. Salah satunya adalah mencegah kecurangan dengan menerapkan manajemen risiko, yang menggambarkan bahwa risiko adalah suatu konsep yang menggambarkan suatu ketidakpastian, atau suatu kejadian atas kondisi yang berkaitan dengan hambatan dalam mencapai tujuan (Susilo & Victor, 2019). Dalam upaya pencegahan kecurangan, manajemen harus melakukan suatu proses pengelolaan sumber daya organisasinya untuk mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi yang sebelumnya telah diidentifikasi, diukur dan dipikirkan bagaimana penanganannya. Setiap aktivitas organisasi akan selalu ada ketidakpastian yang identik dengan risiko termasuk risiko adanya kecurangan (*fraud*), sehingga manajemen harus bertanggungjawab untuk mengelola risiko yang akan dihadapi (Karyono, 2013).

Kajian Literatur

The Institute of Internal Auditor (IIA) suatu organisasi auditor internal di Amerika Serikat, mendefinisikan kecurangan (*fraud*) adalah sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. Artinya adalah bahwa *fraud* merupakan kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh

orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi (Karyono, 2013).

Selanjutnya, Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA) menyatakan *fraud* sebagai kesalahan yang disengaja dan menyembunyikan fakta material, penghilangan bukti untuk melakukan kecurangan dan manipulasi yang merugikan keuangan suatu individu atau organisasi. *Fraud* meliputi penggelapan, pencurian, pemalsuan, penyalahgunaan, dan menghilangkan bukti dengan sengaja (CIPFA, 2013).

Secara umum dapat didefinisikan bahwa *fraud* adalah suatu istilah yang umum, dan mencakup segala macam cara yang dapat digunakan dengan kelihaihan tertentu, yang dipilih oleh seorang individu, untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan melakukan representasi yang salah. Tidak ada aturan yang baku dan tetap yang bisa dikeluarkan sebagai proposisi umum dalam mendefinisikan *fraud*, termasuk kejutatan, tipu muslihat, ataupun cara-cara yang licik dan tidak wajar yang digunakan untuk melakukan penipuan. Batasan satu-satunya untuk mendefinisikan *fraud* adalah hal-hal yang membatasi ketidakjujuran manusia (Zimbelman, *et. al.*, 2014).

Fraud dalam organisasi korporasi umumnya berasal dari dua arah, yaitu internal dan eksternal. *Fraud* internal adalah kecurangan yang berasal dari pihak dalam organisasi perusahaan itu sendiri, seperti korupsi, penyajian laporan palsu, rekayasa laporan keuangan, laporan keuangan ganda, menutupi atau menyamarkan penggelapan uang, ketidakcakapan dalam penghitungan, pencurian atau penggunaan aktiva organisasi yang tidak tepat oleh para pegawai dan manajemen untuk kepentingan pribadi atau kelompok serta penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan *fraud* eksternal yaitu kecurangan yang berasal dari pihak luar organisasi perusahaan, seperti penyuaipan, peninggian nilai faktur, adanya faktur ganda serta penipuan kualitas seperti transaksi barang yang tidak sesuai dengan

penyajian yang telah disepakati (Sayyid, 2014).

Kecurangan atas laporan (*fraudulent statement*) yaitu kecurangan dengan menyajikan laporan keuangan lebih baik dari sebenarnya (*over statement*) dan lebih buruk dari yang sebenarnya (*under statement*) (Karyono, 2013), menyajikan aset atau pendapatan lebih tinggi dari yang sebenarnya, atau menyajikan aset dan pendapatan lebih rendah dari yang sebenarnya (Tuanakotta, 2010), tindakan yang disengaja untuk menghasilkan materi laporan keuangan yang menyesatkan untuk menipu atau menggambarkan posisi keuangan organisasi yang salah (Albashrawi, 2016), membuat organisasi terlihat lebih atau kurang menguntungkan (Apostolou & Apostolou, 2012). Sedangkan kecurangan penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) adalah “mengambil” secara ilegal (tidak sah atau melawan hukum) yang dilakukan oleh seseorang yang diberi wewenang untuk mengelola atau mengawasi aset tersebut (Tuanakotta, 2010). Dan korupsi (*corruption*) adalah perbuatan yang merugikan kepentingan umum/publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi dapat terjadi pada organisasi korporasi swasta maupun pada sektor publik pemerintahan (Karyono, 2013).

Terdapat beberapa hal yang memotivasi manajemen menyajikan laporan keuangan yang mengandung unsur kecurangan: (a) memberikan dukungan agar harga saham tetap tinggi; (b) memberikan dukungan terhadap obligasi dan saham; dan (c) memaksimalkan bonus bagi manajemen (Zimbelman, *et. al.*, 2014).

Menurut Assosiation of Certified Fraud Examiner (ACFE) dalam manual edisi ketiga, aksioma *fraud* meliputi: 1) Tersembunyi, kecurangan ini dilakukan secara tersembunyi dan berusaha untuk menutupi perbuatannya; 2) Bukti sebalik, untuk membuktikan bahwa kecurangan yang terjadi harus diusahakan agar kecurangan tersebut tidak terjadi, demikian pula sebaliknya; 3) Jenis-jenis *fraud*,

yang terdiri dari *intern fraud* dan *system control fraud*. *Intern fraud* terjadi secara alamiah yang melekat dalam setiap bentuk kegiatan. *System control fraud* terjadi karena lemahnya sistem pengendalian intern dan biasanya pelaku mempunyai pengetahuan tentang sistem kerja internal tersebut (Karyono, 2013).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang pelaku melakukan tindakan *fraud*. Karena hampir setiap tindakan kriminal atau kejahatan selalu didorong atau dipicu oleh suatu kondisi dan perilaku penyebab terjadinya. Dalam pembahasan ini, peneliti membatasi hanya dengan menggunakan teori Segitiga Fraud (*Fraud Triangle Theory*). Menurut teori ini, bahwa perilaku *fraud* itu terlaksana atau dilakukan karena adanya tiga unsur, yaitu adanya tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan pembenaran (*rationalization*). Teori yang pertama kali diformulasikan oleh kriminolog Donald R. Cressey (1950) ini, menyimpulkan bahwa penipuan umumnya terbagi dalam tiga ciri-ciri umum. Pertama, pelaku *fraud* yang memiliki kesempatan untuk melakukan penipuan (*opportunity*). Kedua, pelaku *fraud* mempunyai kebutuhan keuangan yang mendesak yang tidak dapat diceritakan kepada orang lain (*pressure*). Ketiga, individu yang terlibat dalam *fraud* merasionalisasikan perbuatan curangnya konsisten dengan kode etik pribadi mereka (*rationalization*) (Cressey, 1950). Dan ketiga faktor *fraud* tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Skousen *et. al.* sebagai "*triangle fraud*" (Skousen *et.al.*, 2009).

Tindakan *fraud* yang banyak terjadi dalam banyak bidang tidak terlepas karena adanya keinginan untuk mengambil hak orang lain demi kepentingan pribadi atau kelompok lalu menjadi pembenaran bahwa kecurangan merupakan hal biasa yang boleh dilakukan dan juga karena adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan. Kecurangan dalam bidang akuntansi dapat terjadi dalam proses pengolahan data akuntansi yang tertuang dalam informasi akuntansi berupa laporan keuangan. Jika faktor kecurangan terjadi

dalam penyusunan laporan keuangan maka dapat dipastikan laporan keuangan yang disajikan tidak wajar. Kecurangan tidak hanya merusak hubungan kepercayaan antara manajemen dan investor namun juga akan menciderai nilai-nilai dari akuntansi itu sendiri.

Kecurangan laporan keuangan memengaruhi berbagai pelaku pasar, termasuk investor, organisasi, dan karyawan. Sebagaimana penelitian sebelumnya memberikan informasi terkait dengan kerugian organisasi secara tidak langsung atas tindakan *fraud*. Selain kerugian material yang ditanggung organisasi, reputasi organisasi mungkin juga dipertanyakan ketika terjadi *fraud*. Kepercayaan investor pada organisasi akan hilang dan mungkin akan menarik seluruh simpanannya termasuk investasi, dan dana pensiun (Perols, 2011; Ugrin & Odom, 2010). *Fraud* yang terjadi pada suatu organisasi adalah sebagai manifestasi klasik dari tata kelola organisasi yang lemah. Pada organisasi swasta dikenal adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*. Masalah ini muncul karena ketika pemilik (*principal*) memberikan wewenang kepada manajer (*agent*) untuk bertindak atas nama mereka. Yang pada dasarnya adalah karena perbedaan kepentingan dan asimetri informasi antara manajer dan pemilik. Masalah ini dapat dihilangkan jika kedua pihak memiliki kepentingan yang sama (Jensen & William, 1976).

Praktik yang tidak sehat dalam tata kelola perusahaan memungkinkan terjadi kecurangan yang sulit terdeteksi oleh pihak pemangku kepentingan. *Corporate governance* merupakan alat untuk menjamin direksi dan manajer (*insider*) agar bertindak yang terbaik untuk kepentingan investor. Badan pengelola pasar modal di banyak negara menyatakan penerapan tata kelola perusahaan di perusahaan-perusahaan publik secara baik telah berhasil mencegah praktik kecurangan atas laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan (Chen, *et. al.*, 2005).

Banyak upaya untuk mencegah praktik kecurangan yang telah dilakukan berdasarkan

teori maupun penelitian yang ada, dengan harapan praktik kecurangan dapat diantisipasi sedini mungkin. Salah satunya adalah mencegah kecurangan dengan menerapkan manajemen risiko, yang menggambarkan bahwa risiko adalah suatu konsep yang menggambarkan suatu ketidakpastian, atau suatu kejadian atas kondisi yang berkaitan dengan hambatan dalam mencapai tujuan (Susilo & Victor, 2019). Dalam upaya pencegahan kecurangan, manajemen harus melakukan suatu proses pengelolaan sumber daya organisasinya untuk mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi yang sebelumnya telah diidentifikasi, diukur dan dipikirkan bagaimana penanganannya (Karyono, 2013). Setiap aktivitas organisasi akan selalu ada ketidak pastian yang identik dengan risiko termasuk risiko adanya kecurangan (*fraud*), sehingga manajemen harus bertanggungjawab untuk mengelola risiko yang akan dihadapi.

Landasan utama dalam pelaksanaan program pencegahan *fraud* yang efektif di organisasi adalah dengan melaksanakan proses penilaian risiko secara menyeluruh. Konsep dasar penilaian risiko *fraud* adalah penilaian keterjadian dan dampak atas risiko yang telah teridentifikasi. Di dalam Committee of Sponsoring Organizations of the Threadway Commission, terdapat beberapa tahapan dalam proses penilaian risiko *fraud* diantaranya: (a) membentuk tim penilai risiko yang melibatkan tingkatan manajemen yang tepat; (b) mengidentifikasi potensi risiko *fraud* organisasi dengan menilai risiko pada seluruh tingkatan organisasi dan yang berasal dari lingkungan internal dan eksternal, mengakomodir berbagai jenis *fraud* serta mempertimbangkan terjadinya *management override control*; (c) menilai kemungkinan dan signifikansi atas masing-masing risiko *fraud* yang telah teridentifikasi; (d) menentukan karyawan dan departemen yang berpotensi terlibat berdasarkan *fraud triangle*; (d) mengidentifikasi kontrol yang ada dan menilai keefektifannya; (e) menilai dan merespon risiko *fraud residual* yang perlu

dimitigasi; (f) mendokumentasikan penilaian risiko *fraud*; (g) menilai risiko *fraud* kembali secara periodik (COSO, 2017). Dan *Fraud Risk Assessment (FRA)* adalah prosedur unik untuk membedakan dan mengevaluasi risiko atas kesenjangan pencapaian tujuan organisasi (Huber, *et. al.*, 2015).

Selanjutnya, Popoola berpendapat bahwa pelaksanaan *fraud risk assessment (FRA)* memerlukan perubahan dan proses siklus yang berulang untuk dapat mengidentifikasi dan menilai risiko atas kesenjangan pencapaian tujuan organisasi. Penilaian atas risiko kecurangan menuntut agar mempertimbangkan atas perubahan lingkungan eksternal dan dampaknya dalam model aktivitas, yang tujuannya adalah sebagai kontrol atas aktivitas internal yang tidak efektif. Penilaian atas risiko kecurangan dianggap sebagai alat yang efektif untuk pencegahan *fraud* dan karena dengan sarana ini dapat meningkatkan kompetensi auditor dalam mencari, mendeteksi dan mencegah *fraud* (Popoola, *et.al.*, 2016).

Dalam teori manajemen risiko menyebutkan bahwa perlakuan terhadap risiko dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu: 1) menghindari risiko, artinya dengan memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas yang mendatangkan risiko; 2) mengurangi risiko, yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya dan mengurangi konsekuensi atau dampaknya; 3) mentransfer risiko, yaitu memindahkan risiko ke pihak lain untuk menanggung risikonya; 4) menerima risiko, artinya tanpa melakukan tindakan lebih lanjut atas kompensasi risiko yang harus diambil; dan 5) mengeksploitasi risiko, yaitu tindakan untuk mengambil risiko dalam pilihan-pilihan lain yang merupakan hasil keputusan proaktif dan dilakukan secara sadar untuk mengambil risiko yang baru karena memiliki area-area yang lebih unggul (Susilo & Victor, 2019). Langkah atau proses yang dilakukan dengan cara sistematis untuk mengelola (*to manage*) ancaman risiko dikenal dengan manajemen risiko (*risk management*) (Siahaan, 2009).

Sedangkan proses manajemen risiko berdasarkan ISO 31000 terdiri tiga proses besar, yang meliputi: (1) penetapan konteks, bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan sasaran organisasi; (2) penilaian risiko, yang terdiri identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko; (3) penanganan risiko, yang terdiri: menghindari risiko, mitigasi risiko, transfer risiko, dan menerima risiko. Ketiga proses besar tersebut didampingi oleh dua proses, yaitu: (a) Komunikasi dan konsultasi; dan (b) Monitoring dan reuiu (Susilo & Victor, 2019; Suwanda, *et. al.*, 2019).

Metode Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui library research, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literature-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian (Baidan, 2016), melalui pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan analisis proses dari proses berpikir secara deduktif dan induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah (Kisworo & Iwan, 2017).

Sedangkan sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari karya-karya penelitian ilmiah terdahulu yang relevan, berupa buku-buku serta karya ilmiah lainnya dengan berbagai sudut pandang. Sedangkan data yang digunakan adalah berbagai data kualitatif yang terjaga kualitasnya yang berbentuk kata-kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto (Sugiyono, 2011) yang berasal dari berbagai sumber tersebut.

Hasil Dan Pembahasan

Sebagaimana pembahasan sebelumnya, bahwa dalam upaya pencegahan kecurangan, manajemen harus melakukan suatu proses pengelolaan sumber daya organisasinya untuk mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi yang sebelumnya telah diidentifikasi, diukur dan dipikirkan bagaimana penanganannya. Setiap aktivitas organisasi akan selalu ada ketidak pastian yang identik dengan risiko termasuk risiko adanya kecurangan (*fraud*), sehingga manajemen harus bertanggungjawab untuk mengelola risiko yang akan dihadapi (Karyono, 2013).

Manajemen risiko dan pengendalian internal memberikan kontribusi bagi penerapan *good corporate governance (GCG)*, khususnya dalam meningkatkan keberhasilan pencapaian sasaran organisasi. Tanpa manajemen risiko, sistem pengendalian internal menjadi berkurang keefektifannya. Sementara tanpa sistem pengendalian internal, aspek pengendalian dari GCG menjadi kurang efektif (Susilo & Victor, 2019).

Robert Moeller dalam kajiannya terhadap *Committee of Sponsoring Organizations (COSO) internal control*, memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan yang antara *corporate governance – risk management – internal control*, sebagaimana tampak pada gambar berikut. Dalam bagian yang berjudul “*Clearing up a few misconception*” ditegaskan bahwa, *enterprise risk management (ERM)* menangani lebih jauh daripada pengendalian internal. Pengendalian internal adalah bagian terpadu dari ERM. Pengendalian internal adalah salah satu bagian penting dari manajemen risiko perusahaan (Moeller, 2014).



Gambar 1. Peran *Internal Control* dalam *Corporate Governance*

Selanjutnya, Ovidiu-Constantin *et. al.* (2010) menyoroti pentingnya manajemen risiko dan perannya dalam audit internal organisasi. Adanya program manajemen risiko berarti menempatkan kepercayaan yang tinggi atas laporan keuangan organisasi dan risiko audit yang lebih baik. Penerapan program manajemen risiko, sebagaimana dengan penelitian sebelumnya yang menjelaskan peran auditor internal dalam memberikan jaminan terhadap manajemen risiko. Sebuah model *audit risk* ditawarkan kepada auditor eksternal dengan didasarkan dan disesuaikan dengan manajemen risiko organisasi, yang intinya bahwa manajemen risiko sebagai solusi untuk krisis kecurangan (Constantin, *et. al.*, 2010).

Sementara pada penelitian sebelumnya difokuskan pada pendekatan holistik untuk manajemen risiko, Dalam penelitiannya, Lister (2007) membahas pentingnya program *antifraud*. Organisasi harus mengetahui risiko untuk memitigasi mereka. Ini membutuhkan penilaian risiko kecurangan yang komprehensif, dan sesuai dengan pendekatan holistik. Program *anti-fraud* dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemangku kepentingan. Namun, Lister menyarankan pendekatan harus proaktif dan reaktif, dengan mengidentifikasi risiko dan memiliki rencana tindakan jika terjadi tindak kecurangan. Itu tiga komponen rencana utama termasuk pengaturan regulasi melalui kebijakan dan komunikasi, agar penilaian dan pemantauan risiko menjadi lebih proaktif, dan melakukan respon dengan merancang rencana yang reaktif. Lister melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan dengan menggunakan segitiga *fraud*, serta menyertakan penilaian pihak ketiga dalam merancang program (Lister, 2007).

Penelitian yang dilakukan oleh Crockford (2005) membahas risiko sebagai fungsi perubahan. Artikel itu awalnya diterbitkan di *Geneva Papers* pada tahun 1976. Dijelaskan bahwa manajemen risiko sebagai kemampuan untuk mengatasi perubahan. Perubahan yang cepat memberikan tekanan tentang

manajemen risiko, hal ini mengakibatkan kesulitan bagi organisasi untuk beradaptasi. Sebagaimana dengan Mehr dan Forbes (1973), Crockford merekomendasikan bahwa manajemen risiko harus difungsikan oleh semua manajer, bukan hanya satu departemen dalam organisasi (Crockford, 2005).

Snider (1990) juga pernah membahas tentang tujuan manajemen risiko dan pentingnya tujuan manajemen risiko yang jelas. Snider (1990) menyoroti langkah-langkah dalam menyusun tujuan manajemen risiko. Pembuatan kebijakan manajemen risiko sebaiknya berasal dari manajer risiko atau konsultan manajemen. Kebijakan yang jelas secara umum dapat memberikan panduan dalam pengambilan keputusan. Apabila diidentifikasi, terdapat beberapa hal yang memengaruhi penetapan tujuan, termasuk struktur organisasi, sistem pelaporan, dan tujuan baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Terlalu fokus terhadap tujuan jangka pendek di masa lalu dapat menyebabkan kerugian karena diabaikannya kontrol dan pencegahan (Snider, 1990).

Sebagaimana penelitian sebelumnya, Snider (1991) mengakui perlunya memperluas fungsi manajemen risiko di luar asuransi, dan adanya kebutuhan manajemen risiko pendidikan. Selain membahas konsep manajemen risiko, Penelitian ini juga memuat tentang sejarah dan perkembangan manajemen risiko, termasuk pengakuan oleh akademisi, buku yang akademik pertama tentang manajemen risiko, dan posisi manajer risiko dalam organisasi. Ia menyoroti resistensi awal oleh manajemen senior, dengan mengutip sebuah gagasan bahwa perubahan adalah sama dengan ketidakpastian. Snider juga membahas terjadinya krisis di awal 1970-an, terkait dengan asuransi yang menyebabkan diterimanya konsep manajemen risiko. Dan pada tahun 1973, Asosiasi Jenewa didirikan, sehingga mendorong penelitian tentang manajemen risiko, dan menerbitkan banyak makalah konseptual tentang topik ini (Snider, 1991).

Aggarwal, Erel, Stulz, dan Williamson (2009) mempelajari efek perkembangan ekonomi dan keuangan suatu negara terhadap tingkat investasi dalam hubungannya dengan tata kelola perusahaan. Temuannya menunjukkan bahwa peningkatan yang baik menghasilkan investasi yang lebih tinggi, dan investasi berkurang terhadap perusahaan yang memiliki tata kelola yang rendah sehingga menghasilkan nilai perusahaan yang lebih rendah. Penelitiannya juga memberikan standar tata kelola minimum untuk audit: (1) biaya konsultasi lebih rendah dari biaya audit; (2) komite audit terdiri dari orang luar yang independen; dan (3) auditor harus disahkan pada rapat tahunan (Aggarwal, *et.al.*, 2009). Hal tersebut diperkuat dengan penelitian Robu (2015) memberikan analisis tentang relevansi adopsi IFRS (*International Financial Reporting Standards*) untuk kepercayaan pada informasi laporan keuangan. Peneliti mengambil sampel 59 perusahaan sebelum dan sesudah adopsi IFRS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan relevansi nilai setelah adopsi IFRS. Metodologi penelitiannya termasuk untuk mengetahui pengaruh adopsi IFRS pada harga saham, dan memberikan rekomendasi bahwa pelaporan terstandarisasi dan transparansi sebagai solusi bagi pasar keuangan yang terpercaya (Robu, 2015).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kang (2008), memberikan analisa dari sudut pandang yang lain dalam literatur *fraud* yaitu studi tentang hukuman reputasi yang terkait dengan penipuan keuangan dan reputasi sebagai hukuman akibat perusahaan yang terlibat. Dalam temuannya menunjukkan peningkatan penalti (penurunan) reputasi atas perusahaan terkait. Penurunan nilai pasar merupakan salah satu dari efek negatif. Peneliti menggunakan teori signal (*signalling theory*) dan teori atribusi (*attribution theory*) untuk menjelaskan hubungan perusahaan terkait. Penelitian ini mengambil sampel 244 perusahaan terkait dan 30 perusahaan yang disangka, dari tahun 1998 hingga 2002. Temuannya juga menunjukkan bahwa peningkatan ketidakpastian mengarah pada

penurunan kepercayaan investor. Namun, dengan tata kelola yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor. Implikasi dari temuannya ini merekomendasikan perlunya reformasi tata pemerintahan (Kang, 2008).

Masih tentang kecurangan atas laporan keuangan. Fleming, Riley Jr., Hermanson, dan Kranacher (2016) memperluas penelitian aspek penipuan dengan studi tentang perbedaan yang paling mendasar atas kecurangan laporan keuangan antara perusahaan publik dengan perusahaan swasta. Para peneliti merasa kekurangan data yang tersedia untuk perusahaan swasta dengan menggunakan sumber data yang disediakan oleh Association of Certified Fraud Examiner (ACFE). Fleming *et al.* (2016) mengutip bahwa kecurangan atas laporan keuangan merupakan suatu bentuk tindak kecurangan yang paling mahal, dengan kerugian rata-rata \$ 1 juta per insiden. Ini adalah selain tambahan dampak reputasi, seperti kebangkrutan dan hilangnya nilai pasar. Beberapa temuan lain dari penelitian ini adalah semakin meningkatnya kontrol terhadap perusahaan publik menunjukkan adanya penggunaan metode pelaporan kecurangan yang masih kurang jelas, seperti perbedaan waktu pelaporan. Dan itu biasanya akan terus bertambah apabila kontrol yang ada terus ditingkatkan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk keperluan audit atas keprihatinannya dalam menyoroti perbedaan perlakuan antara perusahaan publik dan perusahaan swasta (Fleming, *et. al.*, 2016).

Selanjutnya Ng, White, Lee, dan Moneta (2009) meneliti fokus pada pengembangan instrumen untuk mendeteksi kecenderungan kecurangan manajer dalam mengelola pendapatan. Peneliti menggunakan sebuah metode survei skenario etika untuk mengumpulkan informasi guna merancang deteksi instrument penipuan dan faktor analisis yang digunakan sebagai tanggapan. Peneliti juga menggunakan konstruksi intensitas moral untuk mengetahui niat manajer dalam bertindak secara spesifik. Konstruksi terdiri enam karakteristik

intensitas moral termasuk besarnya konsekuensi dan konsensus sosial. Temuannya menunjukkan bahwa instrumen yang diusulkan dapat dijalankan untuk mengukur intensitas moral dalam studi berikutnya (Ng, *et. al.*, 2009).

Sebelumnya, Shafer (2002) juga meneliti tentang peran moral. Shafer menganalisa penipuan atas laporan keuangan dalam konteks model etika pengambilan keputusan. Hasil ANOVA menunjukkan bahwa materialitas dan risiko adalah faktor signifikan yang mempengaruhi kemungkinan melakukan kecurangan, sedangkan faktor moralitas tidak signifikan. Peneliti menggunakan Teori Jones tentang intensitas moral untuk menjelaskan prevalensi manajemen laba. Temuannya menyebutkan efek materialitas dengan catatan adanya rasionalisasi ketika jumlahnya tidak material, dan kemungkinan lebih dari 50% untuk melakukan kecurangan ketika jumlahnya tidak material. Indikator kunci tidak adanya etika perilaku adalah tentang persepsi apa yang dilakukan oleh temannya (Shafer, 2002).

Beberapa peneliti fokus pada tanggung jawab auditor. Kostova (2013) mengungkapkan adanya hubungan antara karakteristik kecurangan dengan prosedur audit. Kostova menggambarkan adanya tanggung jawab auditor untuk mengungkapkan kesalahan dan penipuan. Auditor diharapkan memberikan pendapat dan kesimpulan tentang keandalan laporan keuangan. Selanjutnya peneliti juga mengungkapkan adanya faktor ekonomi yang menyebabkan penipuan, juga mengidentifikasi karakteristiknya. Peneliti menyebutkan lingkungan ekonomi sebagai faktor utama yang mengarah pada kecurangan. Misalnya, organisasi berada di bawah tekanan untuk mencapai target keuangan (Kostova, 2013).

Berbeda dengan Kostova (2013) yang fokus pada faktor ekonomi, Love (2012) meneliti tanggung jawab auditor untuk deteksi kecurangan yang terkait dengan standar pelaporan. Perlu dicatat bahwa standar GAAS (*Generally Accepted Auditing Standards*)

mengakui tidak adanya kemampuan untuk memberikan jaminan yang absolut, melainkan memberikan jaminan yang wajar dan mengurangi risiko material salah saji. Penemuan auditor atas informasi yang dipertanyakan memerlukan evaluasi ulang dari semua area audit. Pelaku kecurangan dapat menyembunyikan perbuatannya melalui pernyataan dan dokumen palsu selama proses audit. Love mencatat perbedaan antara melakukan audit GAAS dan pemeriksaan kecurangan. Audit GAAS menghasilkan opini auditor atas kewajaran presentasi laporan keuangan. Sedangkan pemeriksaan kecurangan adalah mahal karena membutuhkan pemeriksaan semua saldo material, dan audit standar GAAS dirancang untuk mengurangi risiko salah saji material (Love, 2012).

Tentang persepsi auditor, Johnson, Kuhn, Apostolou, dan Hassell (2013) meneliti penilaian risiko kecurangan oleh auditor terhadap sikap manajemen. Para peneliti menguji apakah indikator narsisme yang dapat diamati oleh auditor sebagai indikator peningkatan risiko. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya kaitan antara narsisme dan kecurangan, secara konsisten terhadap perilaku yang diamati dalam kecurangan baru-baru ini. Peneliti mengevaluasi kemampuan auditor untuk mengenali kecurangan, yaitu dibutuhkannya auditor dengan kemampuan yang lebih tinggi dan berpengalaman. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa narsisme manajerial adalah tindakan yang dapat diobservasi dan merekomendasikan peningkatan pedoman penilaian atas kecurangan (Johnson, *et. al.*, 2013).

Philmore dan Michael (2005) melakukan studi yang diperlukan pada persepsi tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kecurangan Enron. Penelitian ini untuk mengetahui sifat dan tingkat kecurangan di Barbados. Para peneliti menggunakan desain metode campuran (*mixed methods*) untuk studi eksplorasi. Dengan melakukan survei terhadap 43 responden tentang persepsi dan pengalaman dalam *fraud*. Maksud dari

pendekatan kualitatif adalah untuk mendukung survei kuantitatif dalam memahami pertanyaan penelitian sepenuhnya. Peneliti melakukan wawancara tatap muka untuk mendapatkan sumber wawasan yang banyak. Artikel ini berguna untuk investor, auditor, dan regulator, serta berkontribusi terhadap pemahaman peran auditor dalam mendeteksi kecurangan. Para peneliti memberikan latar belakang sejarah peran auditor, dan tinjauan literatur terkait, tetapi menemukan masih kurangnya konsensus tentang peran auditor. Ada beberapa temuan yang dipresentasikan dalam studi penelitian ini. Mayoritas responden menyatakan bahwa deteksi kecurangan merupakan tanggung jawab auditor, sementara yang lain menyatakan bahwa deteksi sebagai tanggung jawab manajemen. Secara khusus, responden tersebut dengan latar belakang akuntansi beranggapan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk mendeteksi kecurangan (Philmore dan Michael, 2005).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Nicolaescu (2013) memberikan fokus pada peran internal audit dalam mendeteksi kecurangan. Ukuran perusahaan audit mempengaruhi kualitas terhadap laporan audit. Peneliti menemukan bahwa ketelitian dapat meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi kecurangan. Kemampuan untuk mendeteksi kecurangan juga dapat ditingkatkan dengan keberadaan auditor internal. Suatu temuan menyarankan bahwa *brainstorming* dapat dijadikan sarana untuk auditor internal dalam menanggapi penilaian risiko. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa internal audit adalah bagian yang penting dari tata kelola perusahaan (*corporate governance*) (Nicolaescu, 2013).

Sebelumnya, Kranacher dan Stern (2004) memberikan saran untuk meningkatkan deteksi terhadap *fraud*. Menurut sebuah studi COSO (Committee of Sponsoring Organization), bahwa CEO melakukan 75% dari semua kecurangan (*fraud*). Sementara Klarskov Jeppesen dan Leder (2016) menyatakan perlunya auditor untuk mempertanyakan integritas manajer,

Kranacher dan Stern (2004) mencatat adanya potensi konflik kepentingan antara auditor dengan pelaksana departemen perekrutan. Legislasi berfungsi sebagai pencegah bagi perilaku kecurangan, karena auditor harus secara aktif untuk mendeteksi kecurangan. Selanjutnya peneliti merekomendasikan agar ditingkatkannya pendidikan auditor yang mencakup pemahaman perilaku, keterampilan investigasi dan analisis lebih dalam (Kranacher dan Stern, 2004).

Selanjutnya, Simha dan Satyanarayan (2016) meneliti terhadap persepsi deteksi kecurangan dan metode pencegahan, dengan menggunakan wawancara auditor forensic kualitatif. Peneliti juga mempertimbangkan peran teknologi dalam deteksi dan pencegahan kecurangan. Penelitian ini sebagai tanggapan terhadap kurangnya artikel kualitatif, dan penggunaan auditor forensic dengan melakukan wawancara kualitatif untuk memperluas basis pengetahuan. Peneliti menggunakan tinjauan literatur pada konteks akuntansi *fraud*, ditambah dengan metode deteksi dan pencegahan lainnya. Tinjauan literatur juga termasuk informasi yang terkait dengan penggunaan teknologi untuk melakukan dan memerangi kecurangan. Tujuannya adalah untuk memahami fenomena *fraud* dari perspektif auditor forensic, dengan memanfaatkan pengalaman dari auditor tersebut. Para peneliti menjelaskan metodologi mereka, dengan mengikutsertakan peneliti sebagai instrumen dalam proses penelitian. Simha dan Satyanarayan menemukan bahwa auditor forensic saat masih belum memadai dalam mendeteksi kecurangan, sehingga diperlukan suatu metode untuk menambah, dan meningkatkan penggunaan metode pencegahan yang lain. Para peneliti juga memberikan pengakuan tentang adanya peran lebih dari teknologi dalam *fraud*. Temuan lainnya adalah masalah keamanan dari para responden, dan adanya kebutuhan auditor untuk mendapatkan pelatihan dalam hal profil kriminal, teknologi, serta perilaku dalam keuangan. Peneliti mengakhiri diskusi dengan mengajak untuk melakukan penelitian lebih

mendalam di waktu mendatang (Simha dan Satyanarayan, 2016).

Peneliti lain melakukan penelitian tentang metode otomatis mendeteksi *fraud* (kecurangan). Simeunović, Grubor, dan Ristic (2016) meneliti penggunaan analisis forensik digital untuk mendeteksi *fraud*. Kasus spesifik diperiksa dan diteliti terkait dengan kecurangan karyawan, hasilnya konsep yang diperkenalkan ini terbukti efektif untuk menyelidiki kecurangan akuntansi dan mendeteksi bukti adanya kecurangan digital. Para peneliti mencatat bahwa dari keseluruhan 65% yang terdeteksi penipuan, 10% terdeteksi oleh auditor dan 23% terdeteksi oleh internal kontrol yang proaktif. Simeunović *et al.* menambahkan bahwa pencegahan proaktif memerlukan kontrol yang memadai dan menciptakan budaya jujur serta integritas di tempat kerja. Di era *big data*, teknologi, dan kompleksitas sekarang ini, penulis merekomendasikan adanya pendekatan gabungan analisis digital dan keterampilan audit untuk pencegahan *fraud* (Simeunović, *et al.*, 2016).

Simpulan Dan Saran

Untuk mengeksplorasi dan memahami pola dan tema yang relevan dari deteksi dini terhadap *fraud* laporan keuangan, literatur yang terkait adalah tentang bahasan motivasi, niat, tanggung jawab, dan pencegahan *fraud*. Sebagian besar literatur berfokus pada segitiga *fraud* sebagai konsekuensi dari beberapa kasus *fraud* yang terjadi sebelumnya.

Banyak literatur yang berfokus pada kontrol internal dan tata kelola perusahaan dalam kaitannya dengan proses audit, termasuk kebutuhan untuk peninjauan kembali terhadap kontrol internal dan penilaian risiko yang direncanakan sebagai bagian dari proses audit. Beberapa peneliti mempelajari kemampuan auditor untuk mengenali kecurangan dan menetapkan bahwa dibutuhkan lebih banyak pelatihan bagi auditor untuk mengetahui motivasi seseorang melakukan kecurangan. Sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut terkait dengan pencegahan *fraud* secara

proaktif, karena pencegahan yang proaktif membutuhkan kontrol yang memadai dan etika budaya yang baik dalam perusahaan.

Terdapat temuan bahwa metode deteksi kecurangan saat ini masih kurang memadai. Selain fokus pada proses audit, penelitian juga dilakukan terhadap internal kontrol dan tata kelola perusahaan. Fokus lainnya adalah pada aspek etika dan perilaku budaya perusahaan, untuk pengembangan model deteksi *fraud* dan beberapa strategi pencegahan yang direkomendasikan. Termasuk sejauh mana tanggung jawab audit untuk mendeteksi dalam persepsi auditor tentang pencegahan *fraud*. Dan rekomendasi lainnya adalah kurangnya konsensus peran auditor dalam mendeteksi dan mencegah *fraud*, serta masih terbatasnya penelitian kualitatif yang terkait.

Meskipun banyak literatur tentang *fraud* atas laporan keuangan, masih terdapat kesenjangan terkait dengan pencegahan yang proaktif. Yaitu ditemukannya celah konsep manajemen risiko dalam praktik saat ini untuk mendeteksi dan mencegah *fraud*, serta bagaimana perspektif auditor dalam mendeteksi kecurangan dan membuat model yang proaktif guna mendeteksi dan mencegah *fraud*. Selain itu, praktisi juga dapat menggunakan informasi ini dalam mengembangkan prosedur manajemen risiko yang proaktif guna pencegahan *fraud*, dan bagi auditor mungkin dapat mengembangkan pedoman untuk deteksi dini *fraud* dalam pengawasan terhadap risiko.

Daftar Pustaka

- Abdullahi, R., Mansor N., Nuhu M.S. (2015). Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory, Understanding the Convergent and Divergent For Future Research. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Science*, 5 (4)(Accounting), 38–45.
- Albashrawi, M. (2016). Detecting financial fraud using data mining techniques: A

- decade review from 2004 to 2015. *Journal of Data Science*, 14 (3), 553–569.
- Anggarwal, R., Erel, I., Stulz, R., & Williamson, R.. (2009). Differences in governance practices between U.S. and foreign firms: Measurement, causes, and consequences. *Review of Financial Studies*, 22 (8)(Management), 3131–3169.
- Apostolou, B & Apostolou, N. (2012). *The value of risk assessment: Evidence from recent surveys*.
<http://www.theforensicexaminer.com/>
diunduh 5 Mei 2020.
- Baidan, Nashruddin & Erwati Aziz. (2016). *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chartered Institute of Public Finance Accountancy (CIPFA). (2013). *The Investigation of Fraud in the Public Sector* (12th ed.).
- Chen, G., Firth M. & Gao N.D. (2005). Ownership Structure, Corporate Governance, and Fraud: Evidence from China. *Elsevier: Journal of Corporate Finance*, 12, 424–448.
- Committee of Sponsoring Organization of the Threadway Commission . (2017). *Fraud Risk Management Guide*.
<https://www.coso.org/Documents/COSO-%09Fraud-%09Risk-Management-GuideExecutive-Summary.pdf> diunduh 27 April 2020.
- Cressey, Donald. (1950). The criminal violation of financial trust. *American Sociological Review*, 15 (6), 738–743.
- Crockford, G.N. (2005). The changing face of risk management (first published in 1976 in The Geneva Papers). *Geneva Papers*
- Dechow, P.M., Hutton A.P., Kim J.H. & Sloan R.G. (2012). Detecting Earning Management: A New Approach. *Journal of Accounting Research*, 50 (2), 275–334.
- Enofe, A., Amaria, P., & Hope, M. (2013). The Impact of Forensic Accounting on Fraud Detection. *European Journal of Busniness and Management*, 5 (26), 61–72.
- Fleming, A. S., Riley Jr., R. A., Hermanson, D. R., & Kranacher, M.J. (2016). Financial reporting fraud: Public and private companies. *Journal of Forensic Accounting Research*, 1 (1), A27–A41.
- Gilbert, M. & Wakefield, A. (2018). Tackling fraud effectively in central government departments: A review of the legal powers, skills and regulatory environment of UK central government counter fraud teams. *Journal of Financial Crime*, 25 (2), 384–399.
- Huber, W.D., O.J. Popoola, A. Che-Ahmad, Rose S. Samsudin. (2015). An empirical investigation of fraud risk assessment and knowledge requirement on fraud related problem representation in Nigeria. *Accounting Research Journal*, (10) 1, 40–70.
- Jensen, Michael C. & William H. Meckling. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3.
- Johnson, E.N., Kuhn, J. R., Apostolou, B. A., & Hassell, J. M. (2013). Auditor perceptions of client narcissism as a fraud attitude risk factor. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 32 (1), 203–219.

- Kang, E. (2008). Director interlocks and spillover effects of reputational penalties from financial reporting fraud. *Academy of Management Journal*, 51 (3), 537–555.
- Karyono. (2013). *Forensic Fraud*. Yogyakarta: Andi.
- Klarskov, Jeppesen K., & Leder, C. (2016). Auditors' experience with corporate psychopaths. *Journal of Financial Crime*, 23 (4), 870–881.
- Kostova, S. (2013). Audit procedures for disclosure of errors and fraud in financial statements. *Economic Themes*, 51 (2), 355–375.
- Kranacher, M.J. & Stern, L. (2004). Enhancing fraud detection through education. *CPA Journal*, 74 (11), 66–67.
- Kurniasari, Novia Tri. (2017). *Strategi Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Institut Pertanian Bogor.
- Lister, L.M. (2007). A practical approach to fraud risk. *Internal Auditor*, 64 (6), 61–65.
- Mehr, R. I., & Forbes, S. W. (1973). The risk management decision in the total business setting. *Journal of Risk & Insurance*, 40 (3), 389–401.
- Moeller, Robert R. (2014). *COSO Internal Control-Understanding and Implementing the New Framework*. John Wiley & Son.
- Ng, J., White, G., Lee, A., & Moneta, A. (2009). *Design and validation of a novel new instrument for measuring the effect of moral intensity on accountants' propensity to manage earnings*. (Report No. 1674544). Springer Science & Business Media B.V. h. 367–387.
- Nicolaescu, E. (2013). Internal auditors' role in detecting fraud. *Contemporary Readings in Law and Social Justice*, (1), 106.
- Ovidiu-Constantin, B., Alin-Constantin, D., & Madalina, D. R. (2010). Risk management's importance and role in audit. *Annals of The University of Oradea, Economic Science Series*, 19 (1), 484–489.
- Perols, J. (2011). Financial statement fraud detection: An analysis of statistical and machine learning algorithms. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 30 (2)(19–50).
- Philmore, A., & Michael, H. (2005). An exploratory study of auditors' responsibility for fraud detection in Barbados. *Managerial Auditing Journal*, 20 (3), 284–303.
- Popoola, O.J., Ayoib B. Che-Ahmad, Rose S. Samsudin, K. Salleh, Dorcas A. Babatunde. (2016). Accountants' capability requirements for fraud prevention and detection in Nigeria. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6, S4, 23–34.
- Robu, M.A. (2015). Study on increasing value relevance of accounting information by IFRS. *Audit Financial*, 13 (123), 100–110.
- Sayyid, A. (2014). Pemeriksaan Fraud Dalam Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. *Al_Banjari*, 13 (2), 137–162.
- Shafer, W.E. (2002). Effects of materiality, risk, and ethical perceptions on fraudulent reporting by financial

- executives. *Journal of Business Ethics*, 38 (3), 243–262.
- Siahaan, Hinsa. (2009). *Manajemen Risiko pada Perusahaan dan Birokrasi* (Buku 1). Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Simeunović, N., Grubor, G., & Ristić, N. (2016). Forensic accounting in the fraud auditing case,. *European Journal of Applied Economics*, 13 (2), 4.
- Simha, A., & Satyanarayan, S. (2016). Straight from the horse's mouth: Auditors' on fraud detection and prevention, roles of technology, and white-collars getting splattered with red! *Journal of Accounting & Finance* (2158-3625), 16 (1), 26–44.
- Skousen, C.J., Smith K.R., Wright C.J. (2009). Detecting and Predicting Financial Statement Fraud: The Effectiveness of the Fraud Triangle and SAS No. 99. *Advances in Financial Economics*, 13, 53–81.
- Snider, H.W. (1990). The importance of objectives in risk management. *Risk Management* (00355593), 37 (1), 38–39.
- Snider, H.W. (1991). Risk management: A retrospective view. *Risk Management* (00355593), 38 (4), 47–54.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfa Beta.
- Surjandari, DA, Martaningtyas I. (2015). An Empirical Study: The Effect of Performance Incentives, Internal Control System, Organizational Culture, or Fraud of Indonesia Government Officer. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 6 (5), 71–76.
- Suwanda, D., Burhan A.J., Azhar A., Ellen R. (2019). *Manajemen Risiko – Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Publik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- The Association of Certified Fraud Examiner (ACFE). (2008). *The Report to The Nation on a Occupational Fraud and Abuse*. Texas: Austin.
- The Association of Certified Fraud Examiner (ACFE). (2020). *Report to Nation 2020*. <https://www.acfe.com/uploadedFiles/ACF> diunduh 19 April 2020.
- Tuanakotta, Theodorus M. (2010). *Akuntansi Forensik & Audit Investigative* (Ed. 2). Jakarta: Salemba Empat.
- Ugrin, J. C. & Odom, M. D. (2010). Exploring Sarbanes–Oxley's effect on attitudes, perceptions of norms, and intentions to commit financial statement fraud from a general deterrence perspective. *Journal of Accounting and Public Policy*, 29 (5), 439–458.
- Webster's New York Dictionary. (1964). College Edition (Cleveland and New York). In *Webster's New York Dictionary*. World Publishing. (p. 380).
- Zimbelman, Mark F., Conan C. Albrecht, W. Steve Albrecht, Chad O. Albrecht. (2014). *Akuntansi Forensik (Terjemahan)*. Jakarta: Salemba Empat.